



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2023 KABUPATEN BEKASI**



**Assalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarakatuh**

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu Ta'ala, karena atas limpahan Rahmat-Nya, Ringkasan Laporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik dalam waktu yang telah ditentukan.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 (satu), bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Mentaeri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Ringkasan Laporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023 merupakan gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi di berbagai bidang, sebagai perwujudan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan juga sebagai media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Adapun Ringkasan Laporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dengan muatan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kabupaten Bekasi dapat dilihat dengan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,60	76,13	0.701



2	Angka Kemiskinan	5,01	4,93	-1.597
3	Angka Pengangguran	10,31	8,87	-13.967
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,30	5,32	0.377
5	Pendapatan PerKapita	115,0847	121,6472	5,7022
6	Ketimpangan Pendapatan	0,373	0,397	6,434

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan isu strategis yang capaiannya perlu dipantau. Untuk itulah, pembangunan manusia antarwilayah dimonitor dengan menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berdasarkan indikator pembentuknya, keempat indikator pembentuk IPM mengalami peningkatan. Indikator Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2022 sebesar 74,86 tahun menjadi 75,09 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat suatu daerah baik dari prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, semakin meningkat Umur Harapan Hidup penduduk suatu daerah, menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bekasi juga meningkat dari tahun 2022 13,11 tahun menjadi 13,17 tahun pada tahun 2023. Artinya, penduduk di Kabupaten Bekasi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Sementara itu, nilai Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bekasi mencapai 9,53 tahun pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 9,57 tahun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan secara rata-rata penduduk Kabupaten Bekasi yang berusia 25 tahun keatas telah menyelesaikan pendidikan selama 9 tahun atau kelas IX SMP. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang cepat, pemerintah perlu membekali penduduk dengan keterampilan dan pengetahuan dasar. Meningkatnya angka HLS dan



RLS dapat terus memacu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan utamanya bagi penduduk usia produktif yang sekarang paling banyak jumlahnya.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Bekasi masuk kedalam kuadran I yang artinya angka IPM tinggi dan pertumbuhan IPM diatas rata-rata provinsi. Hal ini perlu terus dipertahankan karena pertumbuhan IPM adalah capaian jangka panjang suatu daerah pada kualitas manusianya. Jika pertumbuhan IPM terus seperti sekarang, maka tidaklama lagi Kabupaten Bekasi akan memiliki angka IPM yang termasuk kategori sangat tinggi.

1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Secara tidak langsung kemiskinan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan dari suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan, menggambarkan kurang berhasilnya pemerataan kesejahteraan antara masyarakat di wilayah tersebut. Selama periode 2022 – 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan dari 5,01 persen pada tahun 2022 menjadi 4,93 persen di tahun 2023. Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi menggambarkan peningkatan kondisi perekonomian penduduk di Kabupaten Bekasi setelah pandemi Covid-19.

1.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 mencapai 10,31 persen dan TPT tahun 2023 menjadi sebesar 8,87 persen. Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi dikarenakan perekonomian di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Pusat berupaya untuk menangani pandemic Covid 19 aktivitas perekonomian dapat berjalan kembali.

Pada tahun 2022, perekonomian mulai membaik akibat dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi. Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2023 mencapai 141.257 orang, berkurang sekitar 55.890 orang jika dibandingkan keadaan tahun 2022 (197.147 orang).

1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bekasi, yang diukur dengan beberapa indikator ekonomi salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi cukup memberikan harapan terhadap peluang berinvestasi maupun memberikan dampak nilai tambah ekonomi terhadap masyarakat. Ini tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023)



memperlihatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional yaitu pertumbuhan rata-rata 5,32 persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 memunculkan harapan bahwa ekonomi di Kabupaten Bekasi mulai bangkit setelah adanya wabah Covid-19 yang melanda beberapa waktu yang lalu. Sektor industri pengolahan memberikan andil tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi, diikuti sektor konstruksi. Untuk industri dengan pertumbuhan 5 persen sudah sangat baik karena besarnya output di sektor ini (tahun 2023 sektor industri tumbuh sebesar 5,88 persen).

1.5 Pendapatan Perkapita

Komponen daya beli diyakini mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan beberapa variabel seperti ketrampilan, kesempatan kerja, dan pendapatan. Informasi dari daya beli dapat mengestimasi pendapatan masyarakat secara riil. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat menjadi parameter penting dalam mengukur pembangunan suatu daerah. Sebagai komponen penyusun IPM, daya beli digambarkan melalui pengeluaran per kapita riil yang telah disesuaikan.

Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bekasi rata-rata Rp 11.757.000,- per orang per tahun. Jika dihitung per bulan, maka daya beli penduduk sebesar Rp 979.750,- per kapita per bulan. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bekasi mencapai Rp. 12.123.000,- per tahun dan jika dihitung per bulannya, maka daya beli penduduk sebesar Rp. 1.010.250,- per kapita perbulan. Hal ini dikarenakan perekonomian di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan setelah upaya dari pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pusat dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Bekasi dan Kabupaten/Kota lainnya. Pulihnya kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, menjadikan momentum pemulihan di sisi *demand* dan *supply* tetap terjaga.

1.6 Ketimpangan Pendapatan

Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesenjangan adalah Gini Rasio. Angka Gini Rasio Kabupaten Bekasi pada periode tahun 2010 – 2023 menunjukkan adanya fluktuasi dengan tren yang meningkat. Pada tahun 2023, rasio gini Kabupaten Bekasi sebesar 0,397. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang sebesar 0,373. Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada peningkatan kesenjangan pendapatan di masyarakat Kabupaten Bekasi.. Trend ketimpangan meningkat, sehingga adanya perbedaan antara distribusi pengeluaran kelompok kaya dengan kelompok miskin. Hal ini perlu mendapat perhatian agar kesenjangan pendapatan di masyarakat di Kabupaten Bekasi menurun.



2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pemerintah pilihan.

Berikut disampaikan capaian kinerja urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Bekasi tahun 2023:

2.1. URUSAN PENDIDIKAN

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85,85	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	87,46	89,60
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	53,32	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bekasi, 2023

2.2. URUSAN KESEHATAN

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,96	1,90
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	86,79	94,44
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	85,45	92,67
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100



8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	32,65	47,65
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	91,34
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13,31	79,86
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,80	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	66,14	76,28
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	53,41	68,61
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	18,03	34,40

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bekasi, 2023

2.3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	98,28	99,95
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100	100
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	19,21	2,30
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	86,46	86,90
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	96,24	95,40
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	82,18	81,44



8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, 2023; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bekasi, 2023,

2.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	16,64	69,09
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,37	0,10
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bekasi, 2023

2.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	97,50	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	86,64	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	17 Menit	16 Menit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bekasi, 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bekasi, 2023, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bekasi, 2023



2.6 URUSAN SOSIAL

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bekasi, 2023

3. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

3.1 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kabupaten Bekasi mendapatkan skor 3,0021 dengan status Sedang.

3.2 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta Catatan atas laporan Keuangan. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 adalah Wajar Dengan Pengecualian.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi (*Unaudit*) Tahun 2023, sebagai berikut:



JENIS PENDAPATAN DAN BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
PENDAPATAN	6.532.634.607.015,00	6.596.894.786.390,00	100,98
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.868.658.755.465,00	2.867.796.340.052,00	99,97
Pendapatan Pajak Daerah	2.430.015.920.949,00	2.370.785.173.765,00	97,56
Pendapatan Retribusi Daerah	153.404.944.548,00	159.725.609.833,00	104,12
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.499.431.098,00	30.460.905.428,00	124,33
Lain-lain PAD Yang Sah	260.738.458.870,00	306.824.651.026,00	117,68
PENDAPATAN TRANSFER	3.663.975.851.550,00	3.729.098.446.338,00	101,78
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.643.429.058.936,00	2.684.189.715.151,00	101,54
Dana Perimbangan	2.379.718.655.936,00	2.404.862.775.151,00	101,06
Dana Insentif Daerah (DID)	10.015.718.000,00	22.341.836.000,00	223,07
Dana Desa	253.694.685.000,00	256.985.104.000,00	101,30
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.020.546.792.614,00	1.044.908.731.187,00	102,39
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	945.718.673.654,00	920.210.847.267,00	97,30
Bantuan Keuangan	74.828.118.960,00	124.697.883.920,00	166,65
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
BELANJA	7.233.225.030.829,00	6.741.804.528.802,00	93,21
BELANJA OPERASIONAL	5.407.632.897.188,00	4.979.214.443.964,00	92,08
Belanja pegawai	2.344.567.269.239,00	2.117.426.867.442,00	90,31
Belanja Barang dan Jasa	2.825.508.207.189,00	2.631.616.930.685,00	93,14
Belanja Subsidi	850.000.000,00	849.987.880,00	100,00
Belanja Hibah	167.005.649.800,00	163.702.122.037,00	98,02
Belanja Bantuan Sosial	69.701.770.960,00	65.618.535.920,00	94,14
BELANJA MODAL	1.029.199.720.446,00	980.323.318.317,00	95,25
Belanja Modal Tanah	62.393.516.000,00	57.872.570.528,00	92,75



Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.306.102.861,00	289.999.957.471,00	90,54
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.864.920.186,00	248.838.723.381,00	96,50
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	347.291.465.135,00	342.643.716.710,00	98,66
Belanja Modal Aset tetap Lainnya	41.343.716.264,00	40.968.350.227,00	99,09
BELANJA TAK TERDUGA	28.687.251.195,00	11.189.278.041,00	39,00
Belanja Tidak Terduga	28.687.251.195,00	11.189.278.041,00	39,00
BELANJA TRANSFER	767.705.162.000,00	771.077.488.480,00	100,44
Belanja Bagi Hasil	258.342.088.000,00	258.342.088.000,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	509.363.074.000,00	512.735.400.480,00	100,66

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bekasi, 2023

5. INOVASI

Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 telah meluncurkan inovasi diantaranya yaitu:

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	JENIS INOVASI
1	BOTRAM (Berkolaborasi Terus Melayani)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Publik
2	Satu Peta Kabupaten Bekasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
3	GEBRAK (Gerakan Eksplorasi, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga)	Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Tata Kelola Pemerintahan
4	KOPI PANAS (Konsultasi, Pendampingan dan Pengembangan Usaha dan Advokasi Koperasi)	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelayanan Publik
5	Aplikasi Pembayaran Retribusi Kebersihan dan Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Tata Kelola Pemerintahan
6	Aplikasi Pemeriksaan dan Penilaian Alat Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Tata Kelola Pemerintahan
7	Layanan BAIKppa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Publik



8	BOSS (Bekasi One Stop Service)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Publik
9	SERBU (Inovasi Ruang Seputar Perhubungan)	Dinas Perhubungan	Jenis Inovasi Lainnya
10	Inovasi Peningkatan Potensi Parkir Berlangganan melalui Pengujian Kendaraan	Dinas Perhubungan	Pelayanan Publik
11	Gerobak Kuring (Gerakan Pengobatan Ternak dan Edukasi Keliling)	Dinas Pertanian	Pelayanan Publik
12	Berani Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	Pelayanan Publik
13	BEBELI (Bekasi Berani Beli)	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bekasi	Tata Kelola Pemerintahan
14	SAPA Bekasi	Badan Pendapatan Daerah	Pelayanan Publik
15	Pengembangan Varietas Padi Lokal Sangat Pulen : Pusaka Bhagasasi	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Inovasi Lainnya
16	Rusa Berlian (Rumah Sakit Berorientasi Pelayanan)	Rumah Sakit Umum Daerah Cabangbungin	Pelayanan Publik
17	Cantingmas (Cegah dan Tangani Stunting bersama Masyarakat)	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi	Pelayanan Publik
18	Petasan Angin (Pemetaan Data Rawan Stunting di Kecamatan Cabangbungin)	Kecamatan Cabangbungin	Tata Kelola Pemerintahan
19	Yanmas Muger (Pelayanan Masyarakat Muaragembong Berseri)	Kecamatan Muaragembong	Pelayanan Publik
20	Muaragembong Kecamatan Indah Wisata Bahari (Muge Kiwari)	Kecamatan Muaragembong	Pelayanan Publik
21	Gerakan Magrib Mengaji bersama Keluarga di rumah (Gema Magadir)	Kecamatan Muaragembong	Pelayanan Publik



22	Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tingkat Kecamatan Babelan untuk Mendukung Penanganan Permasalahan Sosial dan Kesehatan Warga Kecamatan Babelan	Kecamatan Babelan	Pelayanan Publik
23	Command Center Kelurahan Bahagia	Kelurahan Bahagia	Jenis Inovasi Lainnya
24	Pelayanan Online Kelurahan Bahagia	Kelurahan Bahagia	Jenis Inovasi Lainnya
25	Pelayanan Publik Malam (Night Public Service) Kelurahan Kebalen	Kelurahan Kebalen	Pelayanan Publik
26	PERAK (Pusat Ekonomi Rakyat Kebalen)	Kelurahan Kebalen	Inovasi Daerah lainnya
27	PEJANTAN (Pendampingan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kebalen)	Kelurahan Kebalen	Inovasi Daerah lainnya
28	SIPELAUT (Sistem Pemantauan Lingkungan Terpadu)	Kelurahan Kebalen	Jenis Inovasi Lainnya
29	BU KB (Inovasi Bumi Kebalen Bersih)	Kelurahan Kebalen	Inovasi Daerah Lainnya
30	Batu Liontin (Babelan Satu Layanan Calon Pengantin)	Puskesmas Babelan 1	Inovasi Lainnya
31	ANJELIN CB (Antar Jemput Ibu Bersalin Cabangbungin)	Puskesmas Cabangbungin	Pelayanan Publik
32	GEMPITA (Gerakan Masyarakat Pelatihan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak)	Puskesmas Cabangbungin	Pelayanan Publik
33	DIVA TOKCER (Deteksi Dini dengan IVA Test Stop Kanker Serviks)	Puskesmas Cabangbungin	Pelayanan Publik
34	Teladan Ceria (Teman Tablet Tambah Darah untuk Cegah Resiko Anemia)	Puskesmas Cibatu	Pelayanan Publik



35	Sahabat Mila (Sasarengan Hayu Urang Ngabantosan Ibu Hamil dan Melahirkan)	Puskesmas Cikarang	Pelayanan Publik
36	KESWANA (Kesehatan Jiwa Paripurna)	Puskesmas Lemahabang	Inovasi Lainnya
37	Gelang Mas (Gerakan Enam Langkah Cegah Stunting Menuju Masyarakat Sehat)	Puskesmas Sukadami	Pelayanan Publik
38	Posting Sapa (Posbindu Inklusi Gerakan Sehat Tanpa Penyakit Tidak Menular Nusa Indah VIII Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan)	Puskesmas Sukadami	Pelayanan Publik
39	Sistem Pelaporan Pendapatan Tarif Layanan BLUD (SIPAT) di UPTD	Puskesmas Sukamahi	Tata Kelola Pemerintahan
40	Koprol-PTM (Kolaborasi Lintas Program - Penyakit Tidak Menular)	Puskesmas Sukatenang	Pelayanan Publik
41	KIPAS ASI Kasihi Asih (Karena Asi Hidup Indah Anak Sehat Ibu Hebat)	Puskesmas Tarumajaya	Pelayanan Publik
42	SILAW (Sistem Informasi Laporan WALKR's) Puskesmas Waluya (Wilayah Kerja Desa Waluya dan Karangraharja)	Puskesmas Waluya	Tata Kelola Pemerintahan

6. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bekasi tahun 2023 merupakan informasi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bekasi yang disampaikan kepada masyarakat sebagai realisasi tahunan dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023.

Pada akhirnya, pembangunan di Kabupaten Bekasi merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislative, masyarakat dan pelaku usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak



terlepas dari adanya upaya berupaya itikad baik, kerja jeras, kreativitas dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya dan usahanya masing-masing, khususnya Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama, Insan Pers dan Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Bekasi.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bekasi tahun 2023 disampaikan, semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya kepada kita semua.

Aamiin.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Cikarang Pusat, 22 Maret 2024
Pj. BUPATI BEKASI



Dani Ramdan
Dr. H. DANIRAMDAN, MT